



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUAHASIL NAZARA**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **180291**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 12.981.757.000**

1. Tanah Seluas 532 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.704.316.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/374 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.311.761.000
3. Bangunan Seluas 61 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 2045 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 2.110.440.000
5. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 817.600.000
6. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 537.640.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 644.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 206.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 165.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
273.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.800.437.976****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 44.504.428.281****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 14.666.854.718**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.114.830.042
Sub Total	Rp.	78.712.308.017
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	78.712.308.017

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.